



# Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2020

**Kecamatan  
Kelam Permai  
Kabupaten Sintang**

**PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG  
KECAMATAN KELAM PERMAI**

**Jalan Sintang - Putussibau  
Kebong 78656**

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas Perkenan dan Rahmat-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang Tahun 2021 telah tersusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2021 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Kelam Permai Tahun 2021.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan, serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Kelam Permai dalam pencapaian Sasaran dan Program dalam 1 (satu) tahun. Peran serta dari seluruh potensi *stakeholder* Kecamatan Kelam Permai dalam rangka penyusunan Laporan Kinerja mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai ini masih jauh dari sempurna, meskipun di dalam proses penyusunannya melibatkan unit kerja termasuk pemerintah desa dan semua unsur yang ada di wilayah Kecamatan Kelam Permai, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dan objektif dari semua pihak dalam rangka menuju ke arah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya Laporan Kinerja (LKjIP) ini, besar harapan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan unsur aparatur pemerintah dan dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta

bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan Kelay Permai sebagaimana yang diharapkan, dan dapat mendorong pencapaian Visi - Misi Kecamatan dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada warga dan masyarakat Kecamatan Kelay Permai.

Kebong, Januari 2021

Camat Kelay Permai



**LUNSA BALU**

Pembina Tingkat I

NIP. 196304062000121002

# DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Gambaran Umum	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	6
3. Tugas Pokok dan Fungsi	7
4. Sumber Daya Aparatur	16
5. Sumber Daya Keuangan	18
6. Sarana dan Prasarana	18
B. Maksud dan Tujuan	20
C. Permasalahan Utama (Isu Strategis)	21
D. Landasan Hukum	27
E. Sistematika Penyajian	28
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis	30
1. Visi	30
2. Misi	32
3. Tujuan	34
4. Sasaran	35
5. Strategi dan Kebijakan	36
6. Indikator Kinerja Utama	37
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020	39
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja Organisasi	43
1. Pengukuran Kinerja	43
2. Evaluasi Kinerja	46
B. Realisasi Anggaran	68
<b>BAB IV PENUTUP</b>	77
<b>LAMPIRAN</b>	78

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM**

#### **1. Pendahuluan**

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kelam Permai selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sintang, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Kecamatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan pula untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kelam Permai Tahun 2020 yang dimaksudkan merupakan perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Paradigma pemerintah daerah yang telah merubah peran pemerintah Kecamatan dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang di masa lalu terbatas pada tugas pembantuan. Sekarang tugas dan fungsi Camat telah diatur sedemikian rupa, dimana Kecamatan sebagai Perangkat Daerah berperan sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tingkat kewilayahan. Tugas pokok dan fungsi Camat lebih strategis yaitu melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Kabupaten yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

Dengan dilaksanakannya pelimpahan sebagian kewenangan kepada Kecamatan, maka diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat dilaksanakan lebih efisien serta didukung adanya pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan. Dimasa depan Tugas Pemerintah Kabupaten lebih difokuskan kepada persoalan yang strategis yang bersifat makro sedangkan persoalan teknis kewilayahan, termasuk didalamnya penyelesaian persoalan-persoalan kemasyarakatan dapat diselesaikan oleh para Camat.

Pembagian tugas dan tanggung jawab antara Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kecamatan mengindikasikan adanya otoritas dan kapasitas Camat untuk :

1. Melakukan identifikasi potensi local di wilayahnya masing-masing sekaligus strategi mengembangkannya;
2. Memiliki kemampuan untuk mengatur dan mengurus kewenangan yang telah diberikan;
3. Memiliki kemampuan untuk mendinamisasi aktivitas dan kreativitas warga di wilayahnya;
4. Mampu melaksanakan fungsi pemerintahan dan pembangunan;
5. Melaksanakan fungsi pelayanan serta pemberdayaan masyarakat dengan prinsip tepat sasaran dan tepat manfaat.

Secara substantif, kewenangan yang dilimpahkan meliputi kewenangan yang bersifat internal, yakni kewenangan Camat untuk melaksanakan fungsi-fungsi manajemen pemerintah secara utuh, termasuk didalamnya kewenangan yang menyangkut masalah-masalah kepegawaian, barang daerah dan juga pengelolaan keuangan serta kewenangan yang bersifat eksternal, yakni kewenangan yang menyangkut pelaksanaan tugas pembinaan dan koordinasi kemasyarakatan secara utuh, antara lain tugas untuk mengakomodasi berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat, sekaligus dapat melakukan tindakan nyata sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.

Kecamatan Kelay Permai dibentuk pada tahun 1996 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1996 tanggal 1 Juni 1996 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 138/127/POUD tanggal 23 September 1996 Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi “Membentuk Kecamatan Kelay Permai di Kabupaten Sintang” membawahi sebanyak 10 (sepuluh) Desa, yaitu : Desa kebong, Merpak, Baning Panjang, Sungai Maram, Sepan lebang, Sungai Pukat, Pelimping, Bengkuang dan Nanga Lebang. Desa-desa tersebut pada awalnya bagian dari wilayah Kecamatan Sintang.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 07 tahun 2007 di wilayah Kecamatan Kelay Permai terdapat 4 desa yang melakukan pemekaran, yaitu Desa Pelimping menjadi 2 desa yaitu Desa Pelimping (desa induk) dan Desa Gemba Raya (desa pemekaran), Desa Nanga Lebang menjadi 3 desa yaitu Desa Nanga Lebang (desa induk) dan Desa Karya Jaya Bakti serta Desa Mandiri Jaya (desa pemekaran), Desa Sungai Maram menjadi 2 desa yaitu Desa Sungai Maram (desa induk) dan Desa Sungai Lais (desa pemekaran) serta Desa Bengkuang menjadi 3 desa yaitu Desa Bengkuang (desa induk), Desa Landau Kodam dan Desa Sungai Labi (desa pemekaran) dan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor : 21 Tahun 2011 di wilayah Kecamatan Kelay Permai terdapat 1 desa yang melakukan pemekaran, yaitu Desa Merpak menjadi 2 desa yaitu Desa Merpak (desa induk) dan Desa Kelay Sejahtera (desa pemekaran). Dengan demikian Kecamatan Kelay Permai memiliki 17 desa, yaitu :

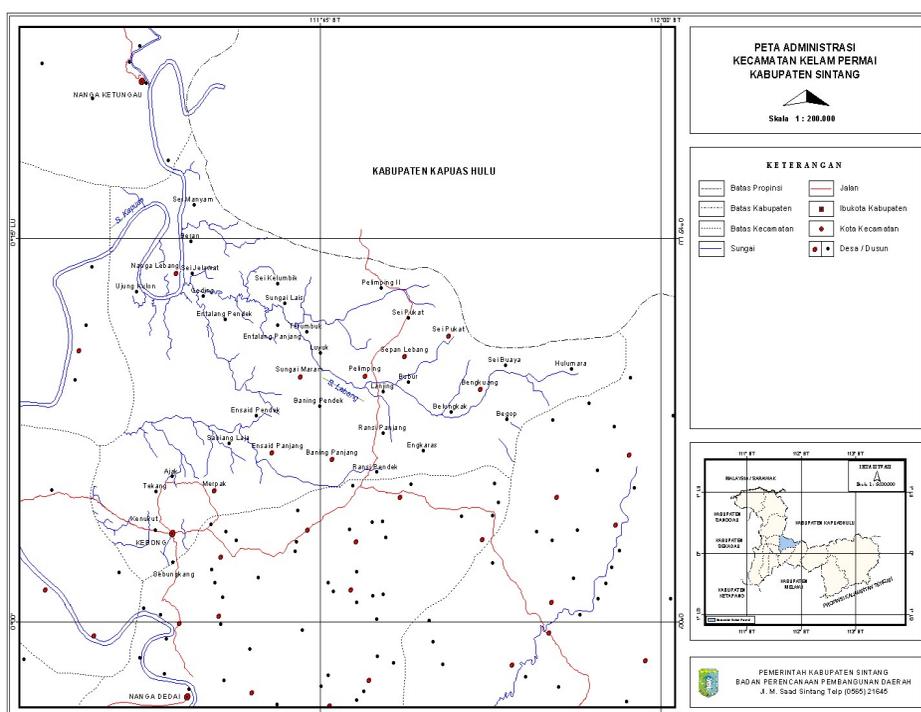
No	Desa	Luas Wil (KM <sup>2</sup> )	Penduduk			Jumlah KK
			L	P	Jumlah	
1	2		3	4	5	6
1	Nanga Lebang	29,27	644	621	1.265	367
2	Merpak	46,45	588	542	1.130	328
3	Kebong	26,00	1.261	1.275	2.536	698
4	Baning Panjang	19,20	839	842	1.681	522
5	Ensaid Panjang	22,00	307	280	587	170
6	Bengkuang	30,60	389	338	727	276
7	Pelimping	51,00	651	604	1.255	324
8	Sungai Pukat	28,00	392	337	729	230
9	Sungai Maram	45,60	788	771	1.559	487
10	Sepan Lebang	18,60	363	348	711	233
11	Landau Kodam	22,00	258	217	475	140
12	Sungai Labi	32,00	313	306	619	184
13	Sungai Lais	25,45	300	301	601	163
14	Gemba Raya	51,00	604	676	1.180	342
15	Karya Jaya Bakti	38,34	552	506	1.058	300
16	Mandiri Jaya	38,29	699	651	1.350	362
17	Kelam Sejahtera		365	346	711	198
	Jumlah	523,80	9.312	8.859	16.171	5.322

Kecamatan Kelam Permai terletak di bagian Utara Kabupaten Sintang dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kapuas Hulu. Secara Geografis Kecamatan Kelam Permai terletak diantara 0<sup>0</sup>02' LU - 0<sup>0</sup>20' LU dan 111<sup>0</sup>20' BT - 111<sup>0</sup>35' BT dengan luas wilayah mencapai 523,80 km<sup>2</sup> atau 2,24% dari luas wilayah Kabupaten Sintang.

Wilayah ini merupakan wilayah terkecil setelah Kecamatan Sintang dan Kecamatan Binjai Hulu, dengan batas wilayah sebagai berikut :

- 🚩 Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas Hulu
- 🚩 Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Kecamatan Dedai, Kecamatan Kayan Hilir dan Kecamatan Sintang
- 🚩 Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kecamatan Binjai Hulu
- 🚩 Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kecamatan Kayan Hilir

## Peta Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang



Secara umum dataran di wilayah Kecamatan Kelam Permai bergelombang sampai berbukit dan sebagian wilayah terdapat rawa-rawa yang bercampur dengan gambut. Bukit di Kecamatan Kelam Permai sebagian dijadikan obyek wisata antara lain Bukit Kelam, Bukit Luit dan Bukit Rentap yang letaknya berjajar dan termasuk dalam beberapa wilayah administratif desa, yaitu Desa Kebong, Desa Merpak, Desa Sungai Maram, Desa Baning Panjang dan Desa Ensaid Panjang.

Iklm di Kecamatan Kelam Permai terdiri dari 2 Musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau, dengan curah hujan rata-rata 2.500 – 3.000 milimeter per tahun dan merata di seluruh wilayah. Secara umum kelembaban udara normal dengan suhu udara rata-rata 26<sup>0</sup>C sampai dengan 30<sup>0</sup>C.

### 2. Susunan Organisasi

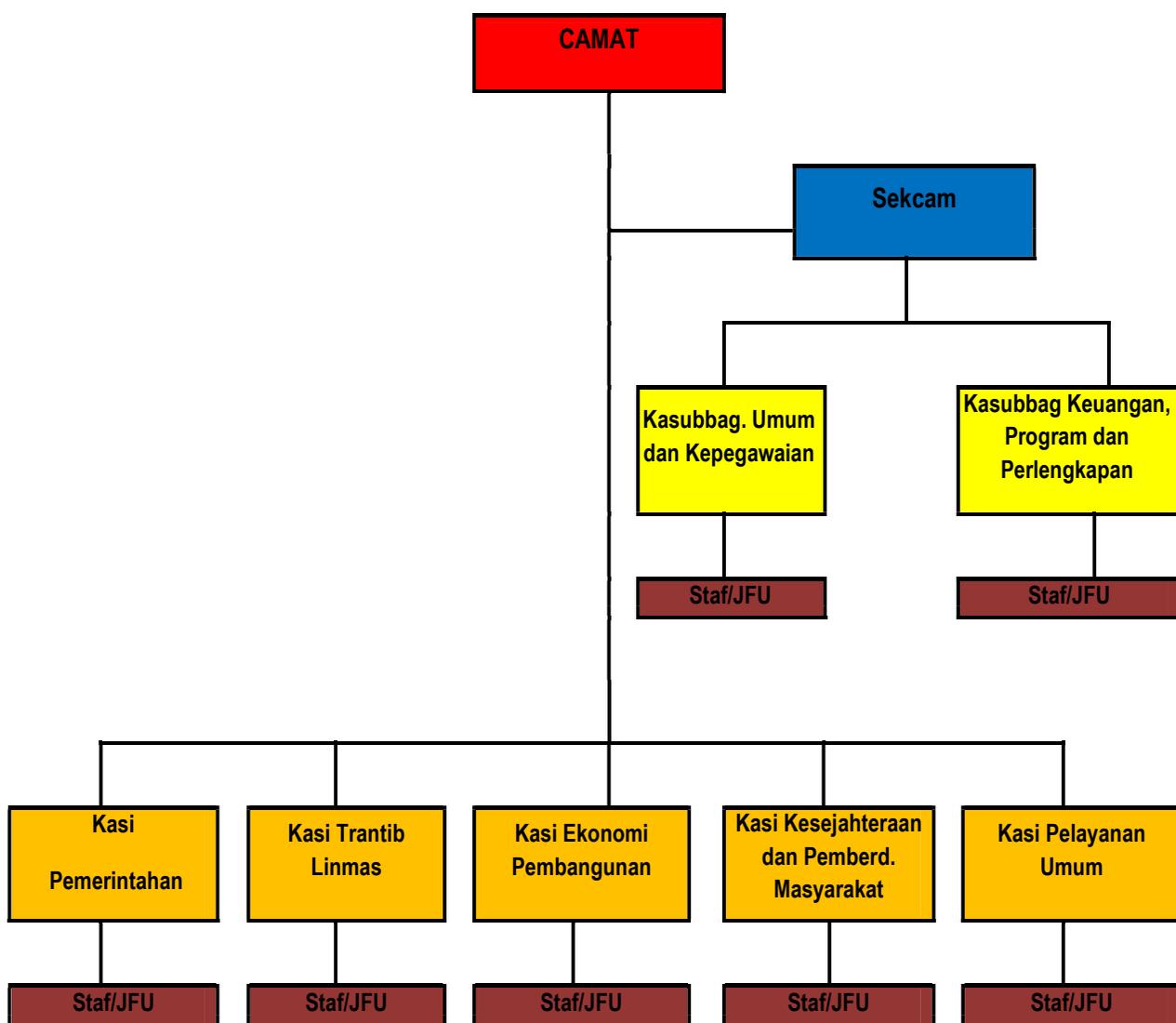
Sejalan dengan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Sintang telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kelam Permai terdiri dari :

1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;

5. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
6. Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Pelayanan Umum;
8. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
9. Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan.

Struktur Organisasi Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang adalah sebagai berikut :



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tersebut, Kecamatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang memiliki wilayah kerja yang dipimpin oleh Camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Camat mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan

pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat, serta melaksanakan tugas-tugas delegatif dari Bupati untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Dari tugas pokok tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

### **1) Camat**

Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa Camat sebagai kepala kecamatan mempunyai tugas memimpin, membina dan menyelenggarakan pemerintahan, ketentraman ketertiban dan pelayanan umum, kesejahteraan masyarakat, pembangunan, ekonomi dan pemberdayaan masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat.

Tugas pokok Camat dapat dijabarkan sebagai sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan kesekretariat kecamatan, dan urusan pemerintahan;
2. Mengkoordinir kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinir penerapan dan penegakkan Peraturan Daerah dan Kepala Daerah;
4. Mengkoordinir pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
6. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten yang ada di kecamatan;
8. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh perturan perundang-undangan;
9. Mengkoordinir pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
10. Mengkoordinir penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang pemerintah kecamatan;

11. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan pelimpahan sebagai kewenangan oleh Bupati kepada Camat.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Camat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
2. Pengawasan dan pengendalian terhadap kebijakan pemerintah daerah yang diselenggarakan dikecamatan;
3. Pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan pemerintahan desa, ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum, peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat serta urusan kesekretariatan kecamatan;
4. Pelaksanaan tugas sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat.

## **2) Sekretaris Kecamatan**

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas mengkoordinasikan urusan kesekretariatan yang meliputi urusan umum dan kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan program serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi :

1. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas sub Bagian, melaksanakan pengawasan dan pemberian petunjuk kerja yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
2. Mengkoordinir pelaksanaan pengolahan urusan umum meliputi Rumah tangga, surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan hubungan kemasyarakatan, urusan dokumentasi/kearsipan, dan urusan protocol;
3. Pelaksanaan pengolahan urusan perlengkapan, yang meliputi urusan administrasi perlengkapan, pengadaan dan pemeliharaan serta inventarisasi perlengkapan rumah tangga kecamatan;

4. Pelaksanaan urusan administrasi keuangan dan perbendaharaan, yang meliputi penyusunan rencana, yang meliputi penyusunan anggaran dan pertanggung jawaban keuangan Kecamatan;
5. Penyusunan rencana, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan ketatausahaan;
6. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan program kerja dan pelaporan;
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **3) Seksi Pemerintahan**

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas di bidang urusan pemerintahan yang meliputi urusan Pemerintahan Kecamatan, Pemerintahan Desa serta mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, seksi pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Seksi Pemerintahan , pegawai dan pemberian petunjuk kerja kepada bawahan yang dilakukan secara lisan dan tertulis agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat dipahami dan dilaksanakan dengan baik;
2. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan di bidang Pemerintahan dan Pemerintahan Desa;
3. Penyusunan rencana penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
4. Melaksanakan Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan, kependudukan dan pertanahan;
5. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan desa dan peningkatan pendapatan dan sumber daya pemerintah desa;
6. Pengelolaan administrasi pertanahan;
7. Penyusunan rencana pelaksanaan pembinaan dan pengamanan asset Pemerintah Kecamatan dan aset kekayaan pemerintah desa.
8. Mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya guna menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah,

serta menyiapkan konsep naskah dinas sesuai disposisi dan arahan pimpinan.

#### **4) Seksi Ketentraman, Keteritiban dan Perlindungan Masyarakat**

Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas melaksanakan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Polisi Pamong Praja, Ketahanan Masyarakat Desa serta mengkoordinasikan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud Seksi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pelaporan urusan ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
2. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta pelayanan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat;
3. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja;
5. Merencanakan dan menyiapkan rumusan dalam upaya pelaksanaan penyelenggaraan urusan ketentraman ketertiban dan perlindungan masyarakat;
6. Mengkoordinasikan penyusunan laporan yang meliputi Laporan kegiatan harian camat dan laporan jenis gangguan tramtib dan kriminalitas.

#### **5) Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan kesejahteraan masyarakat, melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keluarga berencana, dan pembinaan di bidang agama termasuk urusan haji, pendidikan, kebudayaan serta pembinaan di bidang kegiatan pemuda dan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan ketenagakerjaan serta mengkoordinasikan penyelenggaraan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
2. Penyusunan rencana pembinaan pelayanan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita, olah raga dan pemberdayaan masyarakat;
3. Penyusunan rencana pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesejahteraan masyarakat;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan di bidang sumber daya desa;
5. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya masyarakat desa;
6. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan urusan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat;
7. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat serta penyiapan bahan petunjuk pemecahan masalah;
8. Pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pembinaan usaha peningkatan mutu gizi makanan rakyat.

#### **6) Seksi Ekonomi Pembangunan**

Seksi Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan dan mengkoordinasikan peningkatan perekonomian masyarakat serta penyusunan rencana pembangunan, penyediaan fasilitas sarana dan prasarana, pengendalian pembangunan dan pemeliharaan fasilitas umum.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, seksi ekonomi dan pembangunan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan pembinaan perekonomian dan distribusi;
2. Penyusunan rencana dan pemeliharaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat serta pembangunan masyarakat desa;
3. Pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan penyelenggaraan urusan peningkatan ekonomi masyarakat desa dan pembangunan desa;
4. Pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berhubungan dengan bidang penyusunan program perekonomian dan pembangunan;

5. Penginventarisasian permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian dan pembangunan di Kecamatan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
6. Penyiapan bahan dalam rangka pembinaan koordinasi penyusunan program kecamatan;
7. Pengendalian, evaluasi dan monitoring bantuan pembangunan serta sarana dan prasarana Kecamatan.

#### **7) Seksi Pelayanan Umum**

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan pelayanan umum yang meliputi semua urusan pelayanan umum, kekayaan inventarisasi Kecamatan, kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program dan penyelenggaraan pembinaan serta inventarisasi kekayaan kecamatan.
2. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan pelayanan kebersihan, pertamanan dan sanitasi lingkungan;
3. Penyusunan rencana dan pembinaan penyelenggaraan urusan perizinan;
4. Penyusunan rencana dan pembinaan pelayanan umum;
5. Penyusunan laporan penyelenggaraan urusan kekayaan dan inventaris desa, perizinan dan fasilitas umum.

#### **8) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang umum dan kepegawaian.

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

1. Penyusunan bahan rencana program pengelolaan lingkup administrasi umum dan kepegawaian;
2. Pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi penatausahaan naskah dinas dan kearsipan kecamatan serta pelaksanaan administrasi kepegawaian;
3. Pelaporan kegiatan lingkup administrasi umum kepegawaian.

### **9) Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan**

Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan melaksanakan tugas sekretariat kecamatan di bidang keuangan, program dan perlengkapan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan, Program dan Perlengkapan mempunyai fungsi :

1. Penyusunan rencana program pengelolaan administrasi keuangan, program kerja kecamatan dan program pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan serta penatausahaan peralatan dan perlengkapan rumah tangga kantor;
2. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan anggaran, koordinasi pengelolaan dan pengendalian keuangan serta menyusun laporan keuangan;
3. Pelaksanaan pengendalian program meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan kecamatan, koordinasi penyusunan rencana dan program, koordinasi pengendalian program serta penyusunan laporan kinerja kecamatan;
4. Pelaksanaan pengelolaan perlengkapan kantor yang meliputi kegiatan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana pengadaan, pengelolaan dan pemeliharaan serta penatausahaan perlengkapan rumah tangga kantor;
5. Pelaporan lingkup kegiatan pengelolaan administrasi keuangan dan program kerja kecamatan serta kegiatan pengelolaan atas pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan rumah tangga kantor.

### **4. Sumber Daya Aparatur**

Jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada Kantor Kecamatan Kelam Permai sebanyak 28 (dua puluh delapan) orang Pegawai ASN dengan komposisi Per 31 Desember 2021 sebagai berikut:

- 1) Komposisi Pegawai ASN menurut golongan :
  - Golongan II : 12 Orang
  - Golongan III : 15 Orang
  - Golongan IV : 1 Orang

2) Komposisi Pegawai ASN menurut kualifikasi pendidikan formal, terdiri dari:

- SLTA : 13 Orang
- SI : 14 Orang
- S2 : 1 Orang

3) Komposisi Pegawai ASN menurut Eselonering :

- Eselon III.a : 1 Orang
- Eselon III.b : 1 Orang
- Eselon IV.a : 5 Orang
- Eselon IV.b : 2 Orang
- Staf : 19 Orang

Komposisi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kantor Kecamatan Kelam Permai adalah sebagai berikut :

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	2	3	4
1	LUNSA BALU, S.Pd, M.Si 19630406 200012 1 002	Pembina Tk. I (IV/b)	Camat
2	MASTURIFAI, S.Sos 19640602 198703 1 014	Penata Tk. I (III/d)	Sekcam
3	ACHMADI, S.Pd 19640815 198402 1001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Trantib dan Linmas
4	MARYO CHERMOS 19630429 198603 1 007	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Ekbang
5	BUYUNG, S.Sos 19730703 200604 1 011	Penata Tk. I (III/d)	Staf Seksi Ekbang
6	MAGDALENA, S.Sos 19740712 200212 2 006	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Pelayanan Umum
7	BUSAU, S.Sos 19800503200212 1 002	Penata Tk. I (III/d)	Kasi. Pemerintahan
8	THOMSON NABABAN, SE 19820415 201101 1 001	Penata (III/c)	Kasi. Kesejahteraan dan PM

9	HERLAMBANG RIOATMOJO, S.TP 19800417 201101 1 003	Penata (III/c)	Staf Seksi Pelum
10	ANASTASIA, S.Sos 19840811 201001 2 022	Penata (III/c)	Kasubbag. Umum dan Kepg.
11	AJIS, S.Sos 19690915 200604 1 008	Penata Muda Tk. I (III/b)	Anggota Sat.Pol. PP
12	AGUSTINA, S.Sos 19790601 201001 2 025	Penata Muda (III/a)	Kasubbag. Keuangan, Prog dan Perlengkapan
13	YOHANES SANGGAU,S.Sos 19670403 200906 1 002	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Ekbang
14	ANTONIUS NADI SUMARTO,S.A.P 19841115 201212 1 001	Penata Muda (III/a)	Staf Seksi Pemerintahan
15	MAHADI 19820414 200502 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota Sat.Pol. PP
16	ADE TRISNA YULIAN 19700729 200701 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Anggota Sat.Pol. PP
17	ARISTON 19690506 200906 1 004	Pengatur (II/c)	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
18	RATNA DEWI 19700613 200906 2 001	Pengatur (II/c)	Sekretaris Desa Bengkuang
19	PETRUS ALIYANTO 19640409 200701 1 022	Pengatur (II/c)	Staf Seksi Pemerintahan
20	KRISANTUS 19820418 201001 1 003	Pengatur (II/c)	Staf Seksi Pelayanan Umum
21	NOVIANAWATI 19831113 201407 2 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
22	SYAHRUDIN 19840808 201001 1 002	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag Keuangan, Program dan Perlengkapan
23	MAHDI. A.S 19730816 201001 003	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Sekretaris Desa Ng. Lebang
24	MIMIT 19820303 201001 1 004	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Seksi Kesra dan PM
25	RAMLI HAMDI 19830122 201001 1 001	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Staf Subbag. Umum dan Kepegawaian
26	YOSEPH ARIP 19780401 201001 1 005	Pengatur Muda Tk.I (II/b)	Anggota Sat.Pol. PP

## 5. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan merupakan faktor yang sangat penting dalam menunjang pencapaian sasaran Tahun 2020, karena tanpa adanya dukungan dana tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan

mempengaruhi pencapaian sasaran dimaksud. Sumber dana untuk mendukung pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan dalam Tahun 2020 pada Kantor Kecamatan Kelay Permai berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu sebesar **Rp. 2.772.571.516,31** yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Tabel Sumber Daya Keuangan Tahun Anggaran 2020 Kantor Kecamatan Kelay Permai sebagai berikut :

NO.	URAIAN	JUMLAH (Rp.)		BERTAMBAH(BERKURAN G)	
		SEBELUM	SETELAH	SELISIH	%
1	2	3	4	5=4-3	6
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.772.571.516,31</b>	<b>2.682.845.848,00</b>	<b>89.725.668,31</b>	<b>96,61</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Tidak Langsung</b>	<b>2.236.756.256,31</b>	<b>2.152.671.152,00</b>	<b>84.085.104,31</b>	<b>96,24</b>
5.1.1	Belanja Pegawai	2.236.756.258,31	2.152.671.152,00	84.085.104,31	96,24
<b>5.2</b>	<b>Belanja Langsung</b>	<b>535.815.260,00</b>	<b>530.174.696,00</b>	<b>5.640.564,00</b>	<b>99,44</b>
5.2.1	Belanja Pegawai	100.160.200,00	99.301.446,00	858.754,00	99,14
5.2.2	Belanja Barang & Jasa	408.255.060,00	403.473.250,00	4.781.810,00	98,83
5.2.3	Belanja Modal	27.400.000,00	27.400.000,00	0,00	100,00

## 6. Sarana dan Prasarana

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Sarana dan prasarana yang tersedia pada Kantor Kecamatan Kelay Permai adalah :

### 1. Bangunan / Gedung

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Gedung Kantor	1	1	-	-
2	Gedung WIM (Warnet)	1	1	-	-
3	Gedung/ Balai Pertemuan	1	-	1	-
4	Mess Pegawai	1	-	-	1

### 2. Peralatan dan Mesin

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Kendaraan Dinas Roda 4	1	1	-	-

2	Kendaraan Dinas Roda 2	12	8	3	1
3	Komputer	1	-	1	-
4	Laptop	19	12	5	2
5	Printer	16	13	3	-
6	Radio SSB	1	-	1	-
7	Radio IC 2100	1	-	1	-
8	Antena MF/ Fortable	1	-	1	-
9	Mesin Genset	1	-	1	-
10	AC	1	-	1	-
11	Mesin Tebas Rumput	2	-	1	1
12	Sound System	1	1	-	-

### 3. Perlengkapan Kantor

NO	NAMA BARANG	JUMLAH	KONDISI BARANG		
			BAIK	KURANG BAIK	RUSAK BERAT
1	Meja Kerja Lokal	8	8	-	-
2	Meja Podium	1	1	-	-
3	Meja Makan	1	1	-	-
4	Meja Kerja Lokal ½ Biro	1	1	-	-
5	Meja Kerja Pejabat Neywood 1/12 Biro	8	8	-	-
6	Kursi Kerja Futura	40	40	-	-
7	Kursi Kerja Direksi	8	8	-	8
8	Kursi Kerja Uchiwa	1	1	-	-
9	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	2	2	-	-
	Kursi Tamu Kantor	4	4	-	-
10	Kursi Biasa Lokal	1	1	-	-
11	Lemari Kayu	1	1	-	-
12	Lemari Arsip Lokal	3	3	-	-
13	Filling Cabinet	11	11	-	-
	Lemari ES	1	-	1	-

## B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai dibuat dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai Tahun 2020 adalah :

1. Mempertanggungjawabkan kinerja Kecamatan Kelam Permai kepada Bupati Sintang sebagai wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Kelam Permai menuju terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*) dan sebagai wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat.
2. Memberikan umpan balik (*feed back*) dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan kinerja internal Kecamatan Kelam Permai.

Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP Kecamatan Kelam Permai Tahun 2020 mencakup hal-hal sebagai berikut :

- a) Aspek akuntabilitas kinerja bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana pertanggungjawaban Camat atas Capaian Kinerja yang berhasil diperoleh selama Tahun 2020. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana Visi, Misi dan Tujuan/ Sasaran Strategis telah dicapai selama Tahun 2020;
- b) Aspek manajemen kinerja bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKjIP 2020 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Camat untuk upaya-upaya perbaikan kinerja di masa yang akan datang agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

### **C. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)**

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kecamatan Kelam Permai yang berkaitan dengan Tugas Umum Pemerintahan dapat diidentifikasi ada beberapa klasifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kelam Permai, yaitu permasalahan pada tataran kebijakan dan teknis operasional.

Pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kelam Permai sebagai berikut :

1. Regulasi dan kebijakan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan termasuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa selalu

berubah-ubah, sehingga menyebabkan akuntabilitas kinerja aparatur seringkali menghadapi kendala;

2. Belum bisa optimalnya perbaikan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tahun 2019 pada Tahun 2020;
3. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum disertai dengan adanya juklak dan juknis yang lengkap;
4. Kebijakan penetapan anggaran yang relatif lama dalam kaitan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sehingga berdampak pada mundurnya pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Kelay Permai;
5. Perencanaan pembangunan melalui musrenbang belum mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat secara luas. Hal ini karena partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan masih rendah;
6. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, pembinaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, serta pengawasan dan evaluasi program - program pembangunan belum terlaksana dengan baik, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum sepenuhnya terjalin dengan unsur/ instansi terkait;
7. Pesatnya teknologi informasi berdampak pada masalah-masalah sosial sehingga akan menyebabkan ancaman serius terhadap generasi muda, hal tersebut memerlukan penanganan yang serius dari semua unsur termasuk pemerintah;
8. Masuknya investor terutama pihak yang berinvestasi dibidang perkebunan kelapa sawit selain bertujuan untuk berkontribusi mensejahterakan masyarakat sekitar, disisi yang lain juga membawa persoalan dengan timbulnya potensi konflik. Konflik tersebut antara lain berupa munculnya sengketa batas wilayah antar desa, pembagian lahan kepada petani, dan lain sebagainya.

Pada tingkat implementasi teknis operasional pada seksi/sub bagian di lingkungan Kantor Kecamatan Kelay Permai dapat diidentifikasi permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Kelay Permai sebagai berikut :

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelayanan publik sehingga belum mampu memenuhi standar pelayanan publik;
2. Masih rendahnya sumber daya aparatur dalam memberikan pelayanan baik dari segi jumlah maupun kapasitas;

3. Masih belum memadai perangkat penunjang kerja dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
4. Terbatasnya dukungan anggaran dalam menunjang kegiatan operasional pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Kelam Permai sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Kelam Permai. Masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Kelam Permai antara lain :

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi;
3. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
4. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.

Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Kelam Permai adalah :

1. Banyaknya fasilitasi kegiatan OPD Kabupaten di Kecamatan sehingga pelaksanaan program dan tugas rutin Kecamatan menjadi terabaikan;
2. Adanya multi interpretasi terhadap pelimpahan Bupati kepada Camat yang dapat menimbulkan kesenjangan dalam penyelenggaraan Pemerintahan;
3. Pelimpahan kewenangan kepada Camat belum sepenuhnya didukung dengan personil, pembiayaan dan prasarana;
4. Masih adanya aparatur Pemerintah Desa dan juga kelompok masyarakat yang belum memahami arti penting dari proses perencanaan pembangunan partisipatif;
5. Tuntutan dan aspirasi semakin beragam dengan berbagai kepentingan yang seringkali saling bertentangan dan hal tersebut harus diakomodir.

Isu-isu strategis lainnya yang dihadapi oleh Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam kurun waktu 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik)

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat menentukan berjalannya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu reformasi birokrasi Pemerintah Daerah sejak dicanangkan pada tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, tuntutan masyarakat serta dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Reformasi birokrasi Pemerintah Daerah yang harus juga dilakukan di tingkat Kecamatan sebagaimana sasaran yang telah dicadangkan adalah peningkatan pelayanan publik, akuntabilitas dan kapasitas aparatur yang bersih dari KKN;

2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah

Tuntutan masyarakat terhadap kebutuhan pelayanan prima (services excelent) perlu diimbangi dengan citra birokrasi yang mempunyai kompetensi yang baik dalam bidang profesionalisme aparatur, penguasaan komunikasi dan presentasi serta pemahaman terhadap manajemen standar pelayanan minimal public services and public complaint. Sumber daya aparatur merupakan aset strategis dalam kerangka perwujudan good governance. Kata kunci dalam penataan sumber daya aparatur adalah budaya kerja aparatur yang lebih menekankan kepada semangat kerja dan menghidupkan kembali paradigma aparatur sebagai 'pelayan masyarakat'. Selain hal itu sumber daya aparatur juga diarahkan kepada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, yang menekankan pada transparansi, manajemen pemerintahan yang lebih transparan, akuntabilitas, dan peningkatan efektivitas dan efisiensi serta ada upaya dan perhatian yang sungguh-sungguh terhadap penanganan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Pendayagunaan aparatur Pemerintah Kecamatan Kelam Permai dalam makna lain adalah juga pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) yang pada hakekatnya merupakan upaya pembinaan, penyempurnaan, penertiban, pengawasan dan

pengendalian manajemen secara terencana, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pemerintah melalui kerjasama secara terkoordinasi guna mengambil langkah pembaharuan sektor penyelenggaraan negara (public service reform) dalam rangka mewujudkan good governance;

### 3. Penataan Organisasi dan Manajemen Publik

Perwujudan penyelenggaraan Pemerintah yang baik (good governance) diperlukan upaya-upaya penataan dan penyempurnaan tata kerja organisasi. Keberhasilan tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/ organisasi menyangkut pembenahan seluruh unsur Pemerintahan Kecamatan, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada menata pada sistem penyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman. Faktor kunci keberhasilan penataan kelembagaan ini terletak pada pemberdayaan aparatur Kecamatan, OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang dan masyarakat umum sebagai stakeholder, LPM, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan lainnya. Jika demikian halnya, maka pengelolaan pelayanan prima perlu melakukan perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-langkah efisiensi dan efektifitas birokrasinya, melalui penataan sistem dan prosedur kerja, meninjau kembali pembinaan pegawai, memperbaiki reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta mengubah kultur organisasi;

### 4. Pengelolaan Keuangan dan Barang

Keuangan dan barang daerah merupakan salah satu modal utama dalam penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan, oleh karena itu manajemen keuangan dan barang daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam menunjang pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih diarahkan kepada entrepreneurial management yang pada intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan barang daerah yang lebih berorientasi kinerja (Performance Budget) bukan pada kebijakan (Policy Budget). Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system) merupakan bagian penting dalam

rangka mendukung terciptanya good governance di Kecamatan. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata perencanaan penganggaran dan pengeluaran, pemahaman akuntansi serta sistem pengawasan internal Pemerintah atau pemeriksaan internal. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan anggaran dilakukan dengan mendasarkan konsep value for money sehingga tercipta akuntabilitas prima (primaic accountability).

Sedangkan manajemen barang daerah meliputi beberapa tahap yaitu perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk penyimpanan), penggunaan, pemeliharaan dan penghapusan. Setiap tahap, mulai dari perencanaan kebutuhan hingga penghapusan aset daerah harus diketahui dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui legislatif. Sasaran strategis yang harus dicapai daerah dalam kebijakan pengelolaan barang daerah, antara lain adalah :

1. Terwujudnya tertib administrasi mengenai kekayaan daerah, menyangkut barang inventarisasi tanah dan bangunan, penghapusan barang daerah dan sistem pelaporan;
2. Terciptanya efisiensi dan efektivitas penggunaan barang daerah;
3. Pengamanan barang daerah;
4. Tersedianya data dan informasi yang akurat mengenai jumlah barang daerah.

#### **D. LANDASAN HUKUM**

LKjIP Kecamatan Kelam Permai ini ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Bupati Sintang Nomor 55 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Sintang;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sintang Tahun 2016 – 2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sintang.

## **E. SISTEMATIKA PENYAJIAN**

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kelay Permai Tahun 2020 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja. Namun demikian, agar LKJIP ini dapat lebih menjelaskan kinerja Kecamatan Kelay Permai, maka sistematika penyajian disajikan sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan tentang Gambaran Umum Kecamatan Kelay Permai yang memuat Kondisi Geografis, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi, Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Keuangan dan Sarana dan Prasarana Kecamatan. Selain itu pada bagian ini juga diuraikan tentang Maksud dan Tujuan, Isu Strategis, Landasan Hukum dan Sistematika Penyajian.

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan tentang Rencana Strategis yang memuat Visi, Misi, Analisa Swot dan CSF, Tujuan, Sasaran, Strategi Mencapai Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Pada bagian ini juga diuraikan tentang Perencanaan Kinerja Tahun 2020.

## **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN**

Menguraikan tentang Capaian-capaian Organisasi yang memuat tentang Pengukuran Kinerja dan Evaluasi Kinerja. Pada bagian ini juga menguraikan tentang Realisasi Anggaran.

## **BAB IV PENUTUP**

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Kelay Permai Tahun 2020 dan menguraikan strategi peningkatan kinerja serta saran yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa datang.

# BAB II

## PERENCANAAN KINERJA

### A. RENCANA STRATEGIS

Dengan merujuk kepada Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam Undang-undang tersebut ditetapkan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kerjanya.

Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilaksanakan melalui pembangunan secara berkelanjutan, optimalisasi sumber daya dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan untuk menggerakkan potensi pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan secara terencana dan terukur. Pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna akan dapat diwujudkan apabila didahului oleh adanya perencanaan yang terpadu, baik perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan perencanaan tahunan.

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kelam Permai sebagai suatu pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi selama 5 tahun yang dilaksanakan secara sistematis, berjenjang dan terpadu untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan.

## 1. VISI

Visi Kabupaten Sintang adalah **“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sintang yang Cerdas, Sehat, Maju, Religius, dan Sejahtera didukung Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih pada Tahun 2021”**. Rumusan Visi diatas dapat dideskripsikan dari Visi Bupati dan Wakil Bupati Sintang.

## 2. MISI

Misi merupakan pernyataan apa yang harus dicapai dan kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilaksanakan. Kecamatan Kelay Permai sesuai dengan kewenangan yang diberikan serta tugas pokok dan fungsinya berkewajiban untuk mencapai Misi Kabupaten Sintang, yaitu Misi ke 6 (enam):

**“ Menata dan mengembangkan manajemen pemeritah daerah yang sesuai dengan prinsip tata kelole pemerintah yang baik dan bersih”**

## 3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang secara kolektif menggambarkan arah Strategi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan Tupoksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melakukan reformasi birokrasi di pemerintah dan optimalisasi pelayanan publik di Kecamatan Kelay Permai

Adapun sasaran Kecamatan Kelay Permai yang ingin dicapai adalah :

- |            |   |
|------------|---|
| Sasaran 1: | Meningkatnya kualitas pelayanan di Kecamatan  |
| Sasaran 2: | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat Kecamatan  |
| Sasaran 3: | Meningkatnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa |

#### **4. Strategi Sasaran**

Untuk mencapai Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kelam Permai menetapkan strategi-strategi sebagai berikut:

Strategi Sasaran 1. adalah :

Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pelayanan di Kecamatan Kelam Permai

Sasaran 2: Meningkatkan pemberdayaan masyarakat Kecamatan Kelam Permai

Sasaran 3: Meningkatkan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa

#### **5. Kebijakan Sasaran**

Arahan Kebijakan Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan terdiri dari :

Kebijakan Sasaran 1 adalah :

- Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan Kantor Penunjang Kerja
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Publik
- Penguatan Penerapan Standar Pelayanan Publik

Kebijakan Sasaran 2 adalah :

- Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi terhadap penyelenggaraan Kebijakan dan Program Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang.

Kebijakan Sasaran 3 adalah :

- Peningkatan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa
- Peningkatan Pembinaan dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat
- Penguatan Konsultasi dan Koordinasi dengan Instansi terkait

#### **6. Program**

Adapun program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kelam Permai Kabupaten Sintang tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
5. Program Peringatan Hari Besar Nasional dan Daerah;
6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam;
8. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan;
9. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan;
10. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa;
11. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
12. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan;
14. Program Pengembangan Nilai Budaya;
15. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga;

## **B. PEJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Perjanjian Kinerja atau Kontrak Kinerja adalah tekad atau janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun serta harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian Kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan/ Perjanjian Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja/ kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki.

Dokumen Penetapan Kinerja sebagai Dokumen Perjanjian Kinerja mengacu pada dokumen Renstra Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2020 melalui proses penganggaran.

### **1. Indikator Kinerja Utama**

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran strategis instansi pemerintah.

Setiap Sasaran strategis Kantor Kecamatan Kelam Permai dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah Indikator Kinerja Utama, sehingga dapat diukur dengan jelas dan terfokus pada tindakan dan hasil. Oleh karenanya kegiatan yang dilaksanakan bersifat spesifik, terinci dapat diukur dan dapat diwujudkan. Adapun penetapan Indikator Kinerja

Utama Kecamatan Kelay Permai Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1  
Sasaran Strategis dan Indikator kinerja Utama

1	2	3
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	IKM Persentase keluhan/pengaduan yang selesai ditindak lanjuti
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan masyarakat yang difasilitasi
3	Meningkatnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

## 2. Perjanjian Kinerja

Sasaran-sasaran dalam Perjanjian Kinerja sebagaimana yang dituangkan dalam Dokumen Penetapan Kinerja adalah sebanyak 3(sasaran) Sasaran strategis yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelay Permai. Perjanjian Kinerja masing-masing Sasaran yang telah ditetapkan dalam Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Target Sasaran Indikator

SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	IKM	95%
	Persentase keluhan/pengaduan yang selesai ditindak lanjuti	100%
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan masyarakat yang difasilitasi	100%

Meningkatnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	100%
---	---	------

# BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Kerangka Pengukuran dan Evaluasi Kinerja

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja, yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan Kecamatan Kelam Permai dalam rangka mewujudkan misi dan merealisasikan visinya.

#### 1. Penetapan Indikator Kinerja

Indikator kinerja yang digunakan dalam mengukur kinerja Kecamatan Kelam Permai meliputi *input, out put, out come, benefit dan inpact*. Penetapan indikator kinerja didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada. Indikator input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah (Rp.) Indikator lainnya yang merupakan masukan yang turut mempengaruhi terlaksananya kegiatan, seperti sumber daya manusia yang bertanggung jawab atas terlaksananya kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan kegiatan, belum dapat diukur disebabkan keterbatasan data, indikator output bervariasi sesuai dengan apa -yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan. Begitupun indikator outcome, bervariasi tergantung output yang dihasilkan. Penetapan indikator kinerja beserta target capaian indikator kinerja ini mulai dilakukan pada saat perumusan rencana kinerja. Dalam menetapkan indikator sasaran strategis, digunakan indikator-indikator tertentu yang paling mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran.

**Tabel 3.1**

**SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KANTOR  
KECAMATAN KELAM PERMAI 2020**

SASARAN STRATEGIS			
URAIAN		INDIKATOR KINERJA UTAMA	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	1	IKM
		2	Persentase keluhan/pengaduan yang ditindak lanjuti
2	Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	3	Jumlah kegiatan masyarakat yang di fasilitasi
3	Meningkatnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggara pemerintah desa	4	Jumlah Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu

## **2. Sistem Pengumpulan Data Kinerja**

Penyusunan dan pengembangan sistem pengumpulan data kinerja di Kecamatan Kelam Permai diarahkan untuk mendapatkan data kinerja Kelam Permai dalam rangka proses pengambilan keputusan bagi perbaikan kinerja, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat serta efisiensi, keekonomisan dan efektifitas. Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala selama tahun 2020, mulai dari 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dilakukan dengan menggunakan instrument pengumpulan data yang disesuaikan dengan sifat, jenis dan karakteristik data kinerja yang diperlukan sehingga memiliki relevansi dengan data kinerja yang akan diukur ketercapaiannya terhadap target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam target kinerja Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kelam Permai pada tahun 2020.

**Tabel 3.2**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INSTRUMEN**  
**DATA KINERJA KANTOR KECAMATAN KELAM PERMAI 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	INSTRUMEN DATA KINERJA
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)  Persentase keluhan/ pengaduan yang ditindak lanjuti	Hasil survei independen atas penyelenggaraan pelayanan publik di Kecamatan  Jumlah keluhan/ pengaduan yang selesai ditindaklanjuti
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan masyarakat yang di fasilitasi	Laporan akhir kegiatan pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya kegiatan pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggraan pemerintah desa	Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Laporan Hasil evaluasi pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan

### 3. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sebagai dasar dalam menilai berbagai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran maupun tujuan yang ditetapkan dalam Visi dan Misi. Pengukuran kinerja adalah merupakan hasil dari penilaian sistematis dan didasarkan pada indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan dan kinerja sasaran, dengan memanfaatkan data pencapaian kinerja hasil pelaksanaan program dan kegiatan. Kinerja kegiatan merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing kelompok

indikator kinerja kegiatan. Kinerja sasaran merupakan tingkat pencapaian masing-masing indikator sasaran.

Pengukuran tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pencapaian hasil pengukuran kinerja kegiatan. Pengukuran capaian kinerja kegiatan di Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang, telah menggunakan indikator kuantitatif, hal ini dilakukan supaya lebih terukur dan mudah dievaluasi, penetapan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing, sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya.

**Tabel 3.3**  
**SASARAN STRATEGIS, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN METODE**  
**PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA KANTOR KECAMATAN**  
**KELAM PERMAI 2020**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	METODE PENGUKURAN TINGKAT CAPAIAN KINERJA
1	2	3
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di kecamatan	IKM  Persentase keluhan/pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	<u>Jumlah Nilai</u> <u>Jumlah Responden</u>  $\frac{\text{Jlh Pengaduan ditindaklanjuti}}{\text{Jlh pengaduan masyarakat}} \times 100\%$
Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	Persentase kegiatan masyarakat yang difasilitasi	$\frac{\text{Jml Keg yg difasilitasi}}{\text{Jml. Keg.yg direncanakan}} \times 100\%$
Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa	Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	$\frac{\text{Jml. Desa yg menyelesaikan dok. Administrasi}}{\text{Jml. Desa se- Kecamatan}} \times 100\%$

Selanjutnya pengukuran kinerja kegiatan dan kinerja sasaran pada Kecamatan Kelay Permai Kabupaten Sintang pada Tahun 2020 dilakukan dengan membandingkan nilai capaian kinerja dengan target kinerja yang

telah disepakati, yang kemudian akan ditentukan kategori keberhasilannya dengan menggunakan instrument pengukuran dengan parameter penentuan keberhasilan/ketidakberhasilan menggunakan skala sebagaimana berikut:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Capaian Kinerja}}{\text{Target Kinerja}} \times 100 \%$$

Nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

❖	85 s.d 100	:	Sangat Berhasil (SB)	
❖	$70 \leq X < 85$	:	Berhasil (B)	
❖	$55 \leq X < 70$	:	Cukup berhasil (CB)	
❖	< 55	:	Tidak Berhasil (TB)	

Sedangkan penyimpulan pada tingkat sasaran yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan “Metode Rata-rata Tertimbang Data Kelompok”.

Dalam metode ini capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu :

- ❖ Sangat Berhasil ( nilai tengah 92,5%)
- ❖ Berhasil (nilai tengah 77,5%)
- ❖ Cukup Berhasil (nilai tengah 62,5%)
- ❖ Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%)

Nilai capaian akhir (%) sasaran tersebut yaitu rata-rata hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan rumus :

$$\text{Capaian sasaran} = \frac{(\text{Jumlah Nilai Kelompok Kategori} \times \text{Mean Kategorinya})}{\text{Jumlah indikator}} \times 100\%$$

## B. Evaluasi Hasil Pengukuran

### 1. Hasil Pengukuran kinerja

Hasil pengukuran kinerja sesuai mekanisme perhitungan pencapaian kinerja yang diperoleh melalui pengukuran kinerja atas pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi dalam Renstra. Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian sistemik yang sebagian besar



<b>1</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>299.611.560</b>	<b>227.957.060</b>	<b>224.351.696</b>	<b>98,42</b>
1.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	360.000	360.000	360.000	100,00
1.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	14.400.000	15.600.000	13.477.840	86,40
1.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	4.500.000	4.500.000	4.420.800	98,24
1.4	Penyediaan Tenaga Kontrak	78.295.200	78.295.200	77.661.446	99,19
1.5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	20.191.018	19.713.018	19.713.018	100,00
1.6	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	10.746.500	9.740.000	9.688.500	99,47
1.7	Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	2.013.000	2.013.000	2.013.000	100,00
1.8	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	1.320.000	1.320.000	1.320.000	100,00
1.9	Penyediaan Makanan Dan Minuman	11.343.750	11.343.750	11.327.000	99,85
1.10	Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	34.820.000	2.730.000	2.255.000	82,60
1.11	Rapat Koordinasi dan Pembinaan Kedalam Daerah	106.680.000	67.400.000	67.400.000	100,00
1.12	Penyediaan BBM Dan Gas	13.155.000	13.155.000	12.935.000	98,33
1.13	Penyediaan Alat dan Bahan Kebersihan Kantor	1.627.092	1.627.092	1.627.092	100,00
1.14	Penyediaan Jasa administrasi Keuangan	160.000	160.000	153.000	95,63
<b>2</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>117.576.200</b>	<b>65.776.200</b>	<b>64.530.000</b>	<b>98,11</b>
2.1	Pengadaan Kendaraan Dinas	20.000.000	0	0	0
2.2	Pengadaan Mebeleur	15.000.000	0	0	0
2.3	Pengadaan Perangkat Komputer Dan Printer	25.000.000	25.000.000	25.000.000	100
2.4	Pengadaan Peralatan dan perlengkapan	11.000.000	0	0	0
2.5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	24.500.000	21.500.000	20.260.000	94,23
2.6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	2.800.000	0	0	0,00
2.7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	14.076.200	14.076.200	14.070.000	99,96
2.8	Pemeliharaan Rutin Perangkat Komputer Dan Printer	5.200.000	5.200.000	5.200.000	100
<b>3</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>16.800.000</b>	<b>100</b>
3.1	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	16.800.000	16.800.000	16.800.000	100

<b>4</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>41.490.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	41.490.000	0	0	0
<b>5</b>	<b>Program Peringatan Hari Besar Nasional</b>	<b>30.895.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>3.960.000</b>	<b>100</b>
	Peringatan Hari ulang Tahun Republik Indonesia	30.895.000	3.960.000	3.960.000	100
	<b>TOTAL</b>	<b>506.372.760</b>	<b>314.493.260</b>	<b>309.641.696</b>	<b>98,46</b>

Indikator Kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	95	86	86
2	Persentase keluhan/pengaduan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100
Capaian Sasaran Sangat Berhasil (93%)					

Dilihat dari capaian indikator Sasaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (93%). Keberhasilan Kecamatan Kelay Permai selama Tahun 2020 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

1. Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)

Pada tahun 2020 telah dilakukan dua kali survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan pada semester 1 dan semester 2. Dengan melibatkan 50 orang sebagai sampel dari 50 orang 42 Orang menyatakan puas maka pada semester 1 tahun 2020 diperoleh nilai IKM sebesar 84%. Sedangkan pada semester 2 dari 50 orang 44 orang menyatakan puas maka pada semester 2 diperoleh nilai IKM sebesar 88% sehingga jika dirata-ratakan maka nilai IKM pada tahun 2020 sebesar 86% dan capaian tersebut sudah mendekati target yang ditetapkan.

2. Persentase keluhan/pengaduan yang ditindak lanjuti

Selama tahun 2020, di Kecamatan Kelay Permai tidak terdapat keluhan / pengaduan yang menonjol sehingga setiap keluhan/pengaduan yang ada sudah dapat ditindaklanjuti.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur serta Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program Peringatan Hari Besar Nasional.

**b. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	Persen	86	88	89	90	86	95
2	Persentase keluhan/pengaduan yang ditindak lanjuti	Persen	100	100	100	100	100	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kelay Permai Tahun 2016-2021 meskipun pada Tahun 2017 terjadi penurunan pada beberapa Indikator Kinerja yang lebih disebabkan karena faktor sumber daya keuangan atau anggaran, namun pada Tahun 2019 kembali mengalami kenaikan. Tetapi pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan pada beberapa Indikator Kinerja yang lebih disebabkan karena faktor pemangkasan anggaran cukup signifikan dikarenakan ada pengeseran anggaran untuk kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya Kualitansi Pelayanan di Kecamatan Kelay Permai” adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam

melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.

- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Kelay Permai” adalah dengan mengoptimalkan sumber daya baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

**Sasaran 2.** Meningkatkan pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

Untuk mendukung Sasaran “Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan Kelay Permai” maka dianggarkan dana sebesar Rp. **181.442.000** dengan realisasi Rp. **172.563.000** atau sebesar **95,11** dari pagu anggaran. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	%
2	3		4	5
<b>Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan</b>	<b>26.170.000</b>	<b>17.885.000</b>	<b>17.875.000</b>	<b>99,94</b>
Penunjang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	15.145.000	6.860.000	6.850.000	<b>99,85</b>
Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban	11.025.000	11.025.000	11.025.000	<b>100,00</b>
<b>Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam</b>	0	69.072.000	69.072.000	<b>100,00</b>
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	0	69.072.000	69.072.000	<b>100,00</b>
<b>Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan</b>	<b>14.270.000</b>	<b>8.310.000</b>	<b>8.241.000</b>	<b>99,17</b>
Monitoring dan Evaluasi Pendistribusian Raskin	5.960.000	0	0	<b>0,00</b>
Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat	8.310.000	8.310.000	8241000	<b>99,17</b>

<b>Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan</b>	<b>8.983.600</b>	<b>5.130.000</b>	<b>5.310.000</b>	<b>103,51</b>
Penunjang Pengendalian Inflasi Pasar	8.983.600	5.130.000	5.310.000	<b>103,51</b>
<b>Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa</b>	<b>88.234.000</b>	<b>72.605.000</b>	<b>72.065.000</b>	<b>99,26</b>
Penyelenggaraan Lomba/penilaian Desa	9.080.000	0	0	<b>0,00</b>
Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan	28.540.000	28.540.000	28.345.000	<b>99,32</b>
Pembinaan Kesejahteraan Keluarga	6.540.000	6.540.000	6.540.000	<b>100,00</b>
Pelaksanaan Pungutan atas Pajak dan retribusi daerah	10.000.000	10.000.000	9.995.000	<b>99,95</b>
Koordinasi Pemecahan Masalah Perkebunan	12.609.000	10.695.000	10.470.000	<b>97,90</b>
Monitoring dan pendataan Kegiatan Pembangunan	11.000.000	6.365.000	6.250.000	<b>98,19</b>
Pelaksanaan Penertiban Perijinan diwialayah Kecamatan	10.465.000	10.465.000	10.465.000	<b>100,00</b>
<b>Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan</b>	<b>20.845.000</b>	<b>8.440.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Sosialisasi dan pelaksanaan Pemiloihan Kepala Desa serentak	12.405.000	0	0	<b>0,00</b>
Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (Kiat Guru)	8.440.000	8.440.000		<b>0,00</b>
<b>Program Pembinaan dan Permasalahatan Olah raga</b>	<b>61.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Pekan Olah Raga dan Seni Pelajar antar sekolah	11.130.000	0		<b>0,00</b>
Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringati Besar Nasional/RI	50.000.000	0		<b>0,00</b>
<b>Program Pengembangan Nilai Budaya</b>	<b>9.920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
Gawai Dayak	9.920.000	0	0	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>229.552.600</b>	<b>181.442.000</b>	<b>172.563.000</b>	<b>95,11</b>

Kinerja Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

**a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase kegiatan masyarakat yang di fasilitasi	Persen	100	66,67	66,67

Capaian sasaran Cukup Berhasil 66,67%)

Dilihat dari capaian indikator Sasaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Cukup Berhasil (66,67%).

Keberhasilan Kecamatan Kelay Permai selama Tahun 2020 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

**Persentase kegiatan masyarakat yang di fasilitasi**

Pada tahun 2020 telah difasilitasi kegiatan sebanyak 12 kegiatan dari target 17 dan pada pertengahan tahun mendapat tambahan 1 kegiatan sehingga target menjadi 18 kegiatan, maka dapat diperoleh persentase capaian sebesar 66,67% dari hasil perbandingan antara capaian dan target.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Non Alam, Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan, Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa, Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan, Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olah raga dan Program Pengembangan Nilai Budaya

**c. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase kegiatan masyarakat yang di fasilitasi	Persen	100	100	100	100	66,67	100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Tahun 2016, 2017, 2018, 2019 dan 2020 sudah menuju kearah target yang ingin dicapai dalam jangka menengah sesuai dengan Rencana Strategis Kecamatan Kelay Permai Tahun 2016-2021 meskipun pada Tahun 2020 terjadi penurunan pada beberapa Indikator Kinerja yang lebih disebabkan karena faktor sumber daya keuangan atau anggaran hal ini lebih disebabkan karena faktor pemangkasan anggaran cukup signifikan dikarenakan ada pengeseran anggaran untuk kegiatan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19),

**Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kelay Permai” adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya aparatur, sarana dan prasarana serta perangkat penunjang kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta anggaran yang masih belum memadai untuk dapat menunjang tercapainya Indikator Kinerja dalam Sasaran tersebut.
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat Kecamatan Kelay Permai” adalah dengan mengoptimalkan sumber daya baik itu aparatur, sarana dan prasarana, perangkat penunjang kerja dan keuangan yang tersedia dalam melaksanakan tugas dan fungsi.

**Sasaran 3.** Meningkatkan kualitas pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan di Kecamatan

Untuk mendukung Sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan di Kecamatan Kelay Permai” maka dianggarkan

dana sebesar Rp. **48.055.000** dengan realisasi Rp. **39.890.000** atau sebesar **99,55%** dari pagu anggaran. Adapun program dan kegiatan untuk mencapai sasaran ini adalah sebagai berikut:

Program/Kegiatan	Anggaran Awal (Rp)	Anggaran Perubahan	Realisasi (Rp)	%
2	3		4	5
<b>Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa</b>	<b>17.740.000</b>	<b>9.575.000</b>	<b>9.395.000</b>	<b>98,12</b>
Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	9.575.000	9.575.000	9.395.000	<b>98,12</b>
Monitoring, Evaluasi, Pembinaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Aset Desa	8.165.000	0	0	<b>0,00</b>
<b>Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa</b>	<b>30.315.000</b>	<b>30.315.000</b>	<b>30.315.000</b>	<b>100,00</b>
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan ADD	30.315.000	30.315.000	69.072.000	<b>227,85</b>
<b>TOTAL</b>	<b>48.055.000</b>	<b>39.890.000</b>	<b>39.710.000</b>	<b>99,55</b>

Kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas pembinaan, fasilitasi, koordinasi dan pengawasan di Kecamatan” dapat dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai berikut :

**b. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2020**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	100	100

Capaian sasaran Cukup Berhasil 100%)

Dilihat dari capaian indikator Sasaran indikator di atas dapat disimpulkan bahwa Sasaran tersebut di atas dapat dikategorikan Sangat Berhasil (100%).

Keberhasilan Kecamatan Kelay Permai selama Tahun 2020 dalam memberikan dan menjalankan Sasaran ini sebagaimana ditunjukkan pada Pencapaian indikator Sasaran di atas secara ringkas diuraikan berikut ini :

## **Persentase Desa menyelesaikan perencanaan dan pelaporan tepat waktu**

Pengukuran dilakukan dengan membandingkan banyaknya desa yang ada diwilayah Kecamatan Kelay Permai dengan jumlah desa yang menyampaikan dokumen perencanaan dan pelaporan. Desa yang ada diwilayah Kecamatan Kelay Permai sebanyak 17 desa dan desa yang dokumen perencanaan dan pelaporan sebanyak 17 desa maka dapat dilihat antara target dan realisasi adalah 100%.

Program yang menunjang dalam pencapaian Kinerja ini adalah Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

### **d. Membandingkan realisasi Kinerja sampai Tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen Renstra**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi					Target 2021
			2016	2017	2018	2019	2020	
1	Persentase Desa menyelesaikan Dokumen perencanaan dan pelaporan tepat waktu	Persen	100	100	100	100	100	100

Dengan memperhatikan tabel realisasi indikator diatas maka dapat disimpulkan bahwa capaian indikator kinerja sudah sesuai dengan target yang diharap.

### **a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan Kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

- ✚ Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam mencapai Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” adalah adanya keterlibatan berbagai unsur dalam melaksanakan pembinaan, sehingga penyusunan rencana kegiatan harus dikoordinasikan lebih matang. Disamping itu keterbatasan anggaran juga menjadi kendala karena kegiatan pembinaan melibatkan banyak pihak.
- ✚ Untuk lebih mengoptimalkan pencapaian Sasaran “Terwujudnya peningkatan kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembinaan dalam rangka pemberdayaan masyarakat” adalah melakukan sinkronisasi dan koordinasi yang lebih efektif dengan berbagai pihak dalam

merencanakan rencana kerja serta mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.

🗇 memadai.

## B. Realisasi Anggaran

Upaya pencapaian Sasaran-sasaran strategis Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kecamatan Kelam Permai didukung dengan program-program sebagai berikut :

No	Program	Jumlah Anggaran (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	227.957.060
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur	65.776.200
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.800.000
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	0
5	Program Pelaksanaan Wewenang Pemerintah Yang Dilimpahkan Oleh Bupati kepada Camat	221.322.000
6	Program Peringatan Hari Besar Nasional	3.960.000
<b>Jumlah</b>		<b>535.815.260</b>

Program, kegiatan dan jumlah anggaran yang telah ditetapkan Tahun 2020 dengan realisasi sebagai berikut :

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi	Sisa Pagu Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.00.00.5.1 ] Belanja Tidak Langsung -</b>					
5110101	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.184.034.438,00	1.175.136.000,00	8.898.438,00	99,25
5110102	Tunjangan keluarga	145.558.552,91	144.455.236,00	1.103.316,91	99,24
5110103	Tunjangan jabatan	83.294.400,00	82.880.000,00	414.400,00	99,50
5110104	Tunjangan fungsional	23.974.650,00	15.810.000,00	8.164.650,00	65,94
5110105	Tunjangan fungsional umum	80.786.200,00	38.800.000,00	41.986.200,00	48,03
5110106	Tunjangan beras	79.113.056,40	77.272.140,00	1.840.916,40	97,67
5110107	Tunjangan PPh / tunjangan khusus	5.000.000,00	624.192,00	4.375.808,00	12,48
5110108	Pembulatan gaji	500.000,00	19.753,00	480.247,00	3,95
5110109	Jaminan Kesehatan	49.596.014,00	48.658.482,00	937.532,00	98,11
5110122	Jaminan Kematian	9.077.443,00	7.284.253,00	1.793.190,00	80,25
5110123	Jaminan Keselamatan Kerja	5.690.502,00	2.428.096,00	3.262.406,00	42,67
5110201	Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja	516.131.000,00	516.103.000,00	28.000,00	99,99
5110701	Tunjangan Khusus Satuan Polisi Pamong Praja	54.000.000,00	43.200.000,00	10.800.000,00	80,00
<b>Sub Jumlah</b>		<b>2.236.756.256,31</b>	<b>2.152.671.152,00</b>	<b>84.085.104,31</b>	<b>96,24</b>

<b>0.10</b>	<b>KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>				
<b>[ DPPA - 0.1.05.0.4.05.07.00.15.008.5.2 ] Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati -</b>					
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		6.850.000,00	6.850.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.1.05.0.4.05.07.00.15.011.5.2 ] Pembinaan ketentraman dan ketertiban -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		11.025.000,00	11.025.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.1.05.0.4.05.07.00.26.004.5.2 ] Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) -</b>					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	1.431.000,00	1.431.000,00	0,00	100,00
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	21.641.000,00	21.641.000,00	0,00	100,00
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	100,00
5220601	Belanja Penggandaan	330.000,00	330.000,00	0,00	100,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	40.770.000,00	40.770.000,00	0,00	100,00
5231407	Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		69.072.000,00	69.072.000,00	0,00	100,00
<b>0.20</b>	<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>				
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.15.012.5.2 ] Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.15.013.5.2 ] Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.310.000,00	8.241.000,00	69.000,00	99,17
<b>Sub Jumlah</b>		8.310.000,00	8.241.000,00	69.000,00	99,17
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.16.014.5.2 ] Penunjang pengendalian inflasi daerah -</b>					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
5220319	Belanja Jasa Mobilisasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		5.130.000,00	5.130.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.005.5.2 ] Penyelenggaraan lomba/penilaian desa -</b>					
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.006.5.2 ] Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan -</b>					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00	100,00
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	5.445.000,00	5.445.000,00	0,00	100,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	20.765.000,00	20.570.000,00	195.000,00	99,06
<b>Sub Jumlah</b>		28.540.000,00	28.345.000,00	195.000,00	99,32
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.014.5.2 ] Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	5.290.000,00	5.290.000,00	0,00	100,00
5222501	Belanja Transportasi	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		6.540.000,00	6.540.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.020.5.2 ] Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95
<b>Sub Jumlah</b>		10.000.000,00	9.995.000,00	5.000,00	99,95
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.023.5.2 ] Koordinasi pemecahan masalah perkebunan -</b>					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	10.695.000,00	10.470.000,00	225.000,00	97,90
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		10.695.000,00	10.470.000,00	225.000,00	97,90
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.024.5.2 ] Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	6.365.000,00	6.250.000,00	115.000,00	98,19
<b>Sub Jumlah</b>		6.365.000,00	6.250.000,00	115.000,00	98,19
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.17.026.5.2 ] Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	10.465.000,00	10.465.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		10.465.000,00	10.465.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.18.005.5.2 ] Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	9.575.000,00	9.395.000,00	180.000,00	98,12
<b>Sub Jumlah</b>		9.575.000,00	9.395.000,00	180.000,00	98,12
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.18.011.5.2 ] Monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan aset desa -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.20.005.5.2 ] Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	30.315.000,00	30.315.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		30.315.000,00	30.315.000,00	0,00	100,00

<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.21.001.5.2 ] Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.07.0.4.05.07.00.21.002.5.2 ] Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru) -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		8.440.000,00	8.440.000,00	0,00	100,00
<b>0.21</b>	<b>KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA</b>				
<b>[ DPPA - 0.2.13.0.4.05.07.00.20.028.5.2 ] Pekan olahraga dan seni pelajar antar sekolah -</b>					
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5222501	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5222502	Belanja Akomodasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.13.0.4.05.07.00.20.031.5.2 ] Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional/ HUT RI -</b>					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5220111	Belanja Perlengkapan Olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5220209	Belanja Bahan Hadiah dan Penghargaan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5222402	Uang untuk diberikan kepada Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
5222501	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
5222503	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.2.16.0.4.05.07.00.15.019.5.2 ] Gawai Dayak -</b>					
5220117	Belanja Inventaris Perlengkapan Kantor	0,00	0,00	0,00	0,00
5220201	Belanja bahan baku pembangunan ( swakelola )	0,00	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5222501	Belanja Transportasi	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0.40</b>	<b>PEMERINTAHAN UMUM</b>				
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.001.5.2 ] Penyediaan jasa surat menyurat -</b>					
5220103	Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnya	360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		360.000,00	360.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.002.5.2 ] Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik -</b>					

5220303	Belanja Listrik	8.400.000,00	6.570.924,00	1.829.076,00	78,23
5220306	Belanja internet/bandwitch	7.200.000,00	6.906.916,00	293.084,00	95,93
<b>Sub Jumlah</b>		15.600.000,00	13.477.840,00	2.122.160,00	86,40
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.006.5.2 ] Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional -</b>					
5220505	Belanja Pajak Kendaraan Bermotor	4.500.000,00	4.420.800,00	79.200,00	98,24
<b>Sub Jumlah</b>		4.500.000,00	4.420.800,00	79.200,00	98,24
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.007.5.2 ] Penyediaan jasa administrasi keuangan -</b>					
5220309	Belanja Jasa Administrasi Keuangan/Bank	160.000,00	153.000,00	7.000,00	95,63
<b>Sub Jumlah</b>		160.000,00	153.000,00	7.000,00	95,63
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.010.5.2 ] Penyediaan alat tulis kantor -</b>					
5220101	Belanja Alat Tulis Kantor	13.808.018,00	13.808.018,00	0,00	100,00
5220114	Belanja Perlengkapan Komputer Lainnya	5.905.000,00	5.905.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		19.713.018,00	19.713.018,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.011.5.2 ] Penyediaan barang cetakan dan penggandaan -</b>					
5220601	Belanja Penggandaan	9.388.500,00	9.388.500,00	0,00	100,00
5220603	Belanja Cetak dan Barang Cetakan	351.500,00	300.000,00	51.500,00	85,35
<b>Sub Jumlah</b>		9.740.000,00	9.688.500,00	51.500,00	99,47
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.012.5.2 ] Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor -</b>					
5220102	Belanja Alat Listrik dan Elektronik	2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		2.013.000,00	2.013.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.015.5.2 ] Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan -</b>					
5220305	Belanja Surat Kabar/Majalah	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		1.320.000,00	1.320.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.017.5.2 ] Penyediaan makanan dan minuman -</b>					
5221101	Belanja makanan dan minuman rapat	2.268.750,00	2.252.000,00	16.750,00	99,26
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	9.075.000,00	9.075.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		11.343.750,00	11.327.000,00	16.750,00	99,85
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.018.5.2 ] Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah -</b>					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	2.730.000,00	2.255.000,00	475.000,00	82,60
<b>Sub Jumlah</b>		2.730.000,00	2.255.000,00	475.000,00	82,60
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.019.5.2 ] Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah -</b>					
5221501	Belanja perjalanan dinas dalam daerah	67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		67.400.000,00	67.400.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.020.5.2 ] Penyediaan tenaga kontrak -</b>					
5210201	Gaji Pegawai Tidak Tetap	71.400.000,00	71.400.000,00	0,00	100,00

5210301	Jaminan Kesehatan Pegawai Tidak Tetap	6.231.936,00	5.972.276,00	259.660,00	95,83
5210302	Jaminan Kematian Pegawai Tidak Tetap	375.264,00	160.650,00	214.614,00	42,81
5210303	Jaminan Keselamatan Kerja Pegawai Tidak Tetap	288.000,00	128.520,00	159.480,00	44,63
<b>Sub Jumlah</b>		78.295.200,00	77.661.446,00	633.754,00	99,19
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.021.5.2 ] Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas -</b>					
5220105	Belanja Bahan Bahan Bakar Minyak/Gas	12.755.000,00	12.600.000,00	155.000,00	98,78
5220107	Belanja Pengisian Tabung Gas	400.000,00	335.000,00	65.000,00	83,75
<b>Sub Jumlah</b>		13.155.000,00	12.935.000,00	220.000,00	98,33
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.01.022.5.2 ] Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor -</b>					
5220104	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	1.627.092,00	1.627.092,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		1.627.092,00	1.627.092,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.005.5.2 ] Pengadaan kendaraan dinas/operasional -</b>					
5230305	Belanja modal Pengadaan Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.010.5.2 ] Pengadaan mebeleur -</b>					
5231301	Belanja modal Pengadaan Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.011.5.2 ] Pengadaan perangkat komputer dan printer -</b>					
5231201	Belanja modal Pengadaan Komputer Unit/Jaringan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	100,00
5231203	Belanja modal Pengadaan Peralatan Mini Komputer	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00	100,00
5231204	Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.012.5.2 ] Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor -</b>					
5231005	Belanja modal pengadaan alat kantor lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
5231103	Belanja modal pengadaan filing kabinet	0,00	0,00	0,00	0,00
5231511	Belanja modal pengadaan Infocus	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.022.5.2 ] Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor -</b>					
5222003	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	14.076.200,00	14.070.000,00	6.200,00	99,96
<b>Sub Jumlah</b>		14.076.200,00	14.070.000,00	6.200,00	99,96
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.024.5.2 ] Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional -</b>					
5220502	Belanja Penggantian Suku Cadang	19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	100,00
5220503	Belanja Bahan Pelumas	2.500.000,00	1.260.000,00	1.240.000,00	50,40

<b>Sub Jumlah</b>		21.500.000,00	20.260.000,00	1.240.000,00	94,23
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.028.5.2 ] Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor -</b>					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.02.030.5.2 ] Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer -</b>					
5222002	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.03.002.5.2 ] Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya -</b>					
5221204	Belanja pakaian dinas harian (PDH)	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
<b>Sub Jumlah</b>		16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	100,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.05.001.5.2 ] Pendidikan dan pelatihan formal -</b>					
5221502	Belanja perjalanan dinas luar daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
5221701	Belanja kontribusi kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>[ DPPA - 0.4.05.0.4.05.07.00.24.001.5.2 ] Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia -</b>					
5210105	Honorarium Tim Kegiatan	3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00
5220108	Belanja Spanduk/Umbul-umbul/Bendera	0,00	0,00	0,00	0,00
5220312	Belanja Jasa Instruktur/Pelatih	0,00	0,00	0,00	0,00
5221103	Belanja makanan dan minuman kegiatan	0,00	0,00	0,00	0,00
5221404	Belanja pakaian olahraga	0,00	0,00	0,00	0,00
5221406	Belanja pakaian Paskibraka ( lengkap )	0,00	0,00	0,00	0,00
5222503	Belanja Uang Saku	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub Jumlah</b>		3.960.000,00	3.960.000,00	0,00	100,00
<b>Jumlah</b>		2.772.571.516,31	2.682.845.848,00	89.725.668,31	96,76

Dana yang dianggarkan dan realisasi program/ kegiatan sebagai penunjang terwujudnya pencapaian Sasaran yang telah ditetapkan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI	%
Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN</b>	227.957.060,00	224.351.696,00	98,42
	Penyediaan jasa surat menyurat	360.000,00	360.000,00	100,00
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	15.600.000,00	13.477.840,00	86,40
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	4.500.000,00	4.420.800,00	98,24
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	160.000,00	153.000,00	95,62

	Penyediaan alat tulis kantor	19.713.018,00	19.713.018,00	100,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	9.740.000,00	9.688.500,00	99,47
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	2.013.000,00	2.013.000,00	100,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1.320.000,00	1.320.000,00	100,00
	Penyediaan makanan dan minuman	11.343.750,00	11.327.000,00	99,85
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	2.730.000,00	2.255.000,00	82,60
	Rapat-rapat koordinasi dan pembinaan ke dalam daerah	67.400.000,00	67.400.000,00	100,00
	Penyediaan tenaga kontrak	78.295.200,00	77.661.446,00	99,19
	Penyediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas	13.155.000,00	12.935.000,00	98,33
	Penyediaan alat dan bahan kebersihan kantor	1.627.092,00	1.627.092,00	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	65.776.200,00	64.530.000,00	98,11
	Pengadaan kendaraan dinas/operasional	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan mebeleur	0,00	0,00	0,00
	Pengadaan perangkat komputer dan printer	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	14.076.200,00	14.070.000,00	99,96
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	21.500.000,00	20.260.000,00	94,23
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	0,00	0,00	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala perangkat komputer dan printer	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.800.000,00	16.800.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	0,00	0,00	0,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PERINGATAN HARI NASIONAL DAN DAERAH</b>	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	Peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia	3.960.000,00	3.960.000,00	100,00
	<b>Jumlah Sasaran 1</b>	<b>314.493.260,00</b>	<b>309.641.696,00</b>	<b>98,46</b>
Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN</b>	17.875.000,00	17.875.000,00	100,00
	Penunjang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati	6.850.000,00	6.850.000,00	100,00
	Pembinaan ketentraman dan ketertiban	11.025.000,00	11.025.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN BENCANA NON ALAM</b>	69.072.000,00	69.072.000,00	100,00
	Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)	69.072.000,00	69.072.000,00	100,00

	<b>PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN</b>	8.310.000,00	8.241.000,00	99,17
	Monitoring dan evaluasi pendistribusian raskin	0,00	0,00	0,00
	Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat	8.310.000,00	8.241.000,00	99,17
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN</b>	5.130.000,00	5.130.000,00	100,00
	Penunjang pengendalian inflasi daerah	5.130.000,00	5.130.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN DESA</b>	72.605.000,00	72.065.000,00	99,26
	Penyelenggaraan lomba/penilaian desa	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan musyawarah pembangunan kecamatan	28.540.000,00	28.345.000,00	99,32
	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)	6.540.000,00	6.540.000,00	100,00
	Pelaksanaan pungutan atas pajak dan retribusi daerah	10.000.000,00	9.995.000,00	99,95
	Koordinasi pemecahan masalah perkebunan	10.695.000,00	10.470.000,00	97,90
	Monitoring dan pendataan kegiatan pembangunan	6.365.000,00	6.250.000,00	98,19
	Pelaksanaan penertiban perijinan diwilayah kecamatan	10.465.000,00	10.465.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN</b>	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	Sosialisasi dan pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak	0,00	0,00	0,00
	Monitoring Kegiatan Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru)	8.440.000,00	8.440.000,00	100,00
	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA</b>	0,00	0,00	0,00
	Gawai Dayak	0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAHRAGA</b>	0,00	0,00	0,00
	Pekan olahraga dan seni pelajar antar sekolah	0,00	0,00	0,00
	Pelaksanaan Pertandingan Olahraga Peringatan Hari Besar Nasional/ HUT RI	0,00	0,00	0,00
	<b>Jumlah Sasaran 2</b>	<b>181.432.000,00</b>	<b>180.823.000,00</b>	<b>99,66</b>
Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA</b>	9.575.000,00	9.395.000,00	98,12
	Pembinaan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa	9.575.000,00	9.395.000,00	98,12
	Monitoring, evaluasi, pembinaan, pelaksanaan dan pelaporan aset desa	0,00	0,00	0,00
	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA</b>	30.315.000,00	30.315.000,00	100,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ADD	30.315.000,00	30.315.000,00	100,00
	<b>Jumlah Sasaran 3</b>	<b>39.890.000,00</b>	<b>39.710.000,00</b>	<b>99,55</b>
	<b>Jumlah Total</b>	<b>535.815.260,00</b>	<b>530.174.696,00</b>	<b>98,95</b>

Dari jumlah dana yang dianggarkan pada Tahun 2020 sebesar Rp. 535.815.260 terealisasi sebesar Rp. 530.174.696 atau terserap sebesar 98,95%. Dengan dibatasinya nomenklatur bagi kecamatan sebagai perangkat

daerah sesuai tugas dan fungsinya, maka berimplikasi pada sulitnya melakukan penyalarsan terhadap pencapaian Sasaran yang merupakan penjabaran dari Misi.

## **BAB IV** **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelay Permai Tahun 2020 merupakan bentuk penyampaian informasi dan transparansi terkait dengan kinerja yang telah dicapai oleh organisasi sehubungan dengan anggaran yang telah digunakan. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi secara jelas keluaran (*outputs*) dan hasil (*outcomes*) dari setiap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan kinerja ini memuat pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya serta efektivitas dan efisiensi program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

LKjIP Kecamatan Kelay Permai Tahun 2020 ini dapat menggambarkan kinerja dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam Tahun 2020 Kecamatan Kelay Permai menetapkan sebanyak 4 (empat) Sasaran dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sasaran 1 dengan capaian indikator 93% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);
2. Sasaran 2 dengan capaian indikator 66,67% atau interpretasi Cukup Berhasil (SB);
3. Sasaran 3 dengan capaian indikator 100% atau interpretasi Sangat Berhasil (SB);

dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 (empat) Sasaran tersebut, secara umum telah sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2020 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Kelay Permai dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai, telah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang, total lokasi anggaran Kecamatan Kelay Permai Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 2.772.571,31 yang terdiri dari Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.236.756.256,31 dan Belanja langsung sebesar Rp.535.815.260 Sedangkan realisasi anggaran

mencapai Rp. 2.682.845.848 atau dengan serapan dana mencapai 96,76%, dengan demikian dapat dikatakan Tahun 2020 Kecamatan Kelam Permai kondisi anggaran terdapat Silpa Rp. 89.725.668,31.

Dalam waktu 1 (satu) tahun Kecamatan Kelam Permai telah menggunakan anggaran :

- a. Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.152.671.152 dari total anggaran Belanja tidak langsung sebesar Rp. 2.236.756.256,31 atau terserap 96,24%;
- b. Belanja langsung sebesar Rp. 530.174.696 dari total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp. 535.815.260 atau terserap 98,95%;

dengan demikian hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Kecamatan Kelam Permai telah optimal, dan agar dapat menjadi lebih optimal dan lebih efektif serta efisien dalam meningkatkan kinerja untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Sintang, maka perlu lebih ditingkatkan kembali kinerja dari segenap aparatur agar di tahun berikutnya dapat menjadi lebih baik, khususnya bagi aparatur Kecamatan Kelam Permai.

Dalam pencapaian kinerja tersebut tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, terutama hambatan yang bersifat internal. Untuk itu sangat diperlukan perhatian yang serius terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kesungguhan dan komitmen untuk membangun budaya kerja yang kondusif;
2. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dan peningkatan sarana dan prasarana yang memadai sesuai kebutuhan pelayanan publik dalam upaya meningkatkan kinerja aparatur;
3. Peningkatan disiplin aparatur dalam upaya menghindari keluhan/pengaduan atas pelayanan yang diberikan.

Terkait dengan penyusunan LKjIP ini dalam upaya pembenahan ke depannya dapat kami sarankan sebagai berikut :

1. Adanya konsistensi aturan tentang penyusunan LKjIP;
2. Penyusunan dokumen LKjIP bukan hanya menjadi kewajiban syarat formal bagi OPD, tetapi dilakukan verifikasi agar OPD dapat memahami kekurangan untuk dilakukan pembenahan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kelam Permai ini, diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Sintang khususnya Kecamatan Kelam Permai.

Kebong, Januari 2021

Camat Kelam Permai



**LUNSA BALU**

Pembina Tingkat I

NIP. 196304062000121002

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

SKPD : KECAMATAN KELAM PERMAI

TAHUN : 2021

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Kecamatan	1. IKM 2. Persentase Keluhan/Pengaduan yang selesai ditindaklanjuti	Persen Persen	95 100	86 100	90,53 100
2	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan	1. Persentase Kegiatan Masyarakatn yang difasilitasi	Persen	100	66,67	66,67
3	Meningkatnya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Desa	1. Jumlah Desa yang menyelesaikan dokumen Perencanaan dan Pelaporan Tepat Waktu	Desa	17	17	100
<b>Capaian Kinerja Sasaran</b>						<b>87,31</b>

**(Sangat Berhasil)**

**Jumlah Total Anggaran Tahun 2020 Untuk Mencapai Sasaran : Rp. 535.815.260**

**Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 : Rp. 530.174.696**

**(98,95%)**

Kebong, Januari 2021

**CAMAT KELAM PERMAI,**



**LUNSA BALU, S.Pd,M.Si**

Pembina Tingkat I

NIP. 19640602 198703 1 014